

SKRIPSI

**KINERJA KPU KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN
2024**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Univesitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

ELISA OKTRIANI
NIM. 2020B1D026

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

KINERJA KPU KOTA MATARAM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU PRESIDEN 2024

Elisa Oktriani¹, H. Darmansyah², Yudhi Lestanata³

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024 memiliki 5 aspek yaitu pertama kualitas kerja, Kualitas kerja dari KPU Kota Mataram dapat dilihat dari segi keberhasilannya komisioner dan staff KPU Kota Mataram dalam mengelola logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pemilu yang dinilai sudah efektif, serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi pemilih dan pemantau pemilu yang dapat diakses melalui jejaring media. Kedua produktivitas, produktivitas KPU Kota Mataram yaitu melakukan pendataan pemilih, pengadaan logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman terkait tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilu. Ketiga inisiatif, inisiatif dari KPU Kota Mataram yaitu melakukan edukasi pemilih secara langsung di komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula dan melakukan pelatihan intensif kepada petugas KPPS dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, serta mengembangkan platform digital untuk memudahkan pemilih dalam mengakses informasi mengenai pemungutan suara, daftar calon, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Keempat kerja sama, KPU Kota Mataram telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah kota mataram dalam rangka memastikan dukungan logistik dan infrastruktur seperti, penyediaan TPS, pengamanan dan fasilitas kampanye, Serta melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan seperti, pemantauan TPS, pendidikan pemilih, dan pengawasan kampanye. Kelima tanggung jawab, tanggung jawab dari KPU Kota Mataram yaitu berupa menyampaikan pelaporan mengenai laporan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU NTB sampai KPU RI seperti data kehadiran pemantau dan saksi peserta pemilu di setiap TPS, serta laporan mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara seperti data perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan maupun kota.

Kata Kunci: Kinerja, KPU, Partisipasi Politik Masyarakat

**THE MATARAM CITY KPU'S PERFORMANCE IN INCREASING
COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN 2024 PRESIDENTIAL
ELECTION**

Elisa Oktriani¹, H. Darmansyah², Yudhi Lestanata³

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate how well the Mataram City General Elections Commission (KPU) performed in raising voter turnout for the presidential election of 2024. The study combines a descriptive qualitative approach with a qualitative method. Interviews, documents, and theoretical evaluations were used to gather data. According to the results, the Mataram City KPU's effectiveness in raising community political engagement in the 2024 presidential election consists of five elements: First, the caliber of the job, as demonstrated by the commissioners' and staff's efficient handling of logistics, personnel, and election infrastructure, as well as the availability of efficient methods for filing complaints via media networks. The second is productivity, which is demonstrated by initiatives to inform the public about the phases of the election process through community engagement, voter registration, and logistics procurement. Third, initiative, as shown by the creation of digital platforms to make it easier for voters to access information about voting, candidate lists, and polling station (TPS) locations; direct voter education in communities and schools, with a focus on first-time voters; and intensive training for KPSS officers to increase capacity and professionalism. Fourth, cooperation. This includes working with the city government of Mataram to provide logistical and infrastructural support, including TPS provision, security, and campaign facilities; it also involves working with NGOs and community organizations (ORMAS) on projects like voter education, TPS monitoring, and campaign management. The fifth role involves summarizing the results of the vote count at the sub-district and city levels as well as providing data to the NTB KPU and the national KPU. This includes information on the attendance of election observers and witnesses at each TPS.

Keywords: *Performance, KPU, Community Political Participation*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi, dimana kekuasaan berasal dari Rakyat. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Pemilihan Umum (PEMILU) dipahami sebagai suatu proses pemungutan suara di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan memiliki hak yang sama untuk dipilih.

Pemilihan Umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan urusan nasional yang diselenggarakan dengan menjunjung tinggi asas keutuhan dan kemandirian. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya mengenai panitia yang terlibat seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Panitia ini memegang peranan penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Umum, dengan tujuan untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilu yang transparan, inklusif, dan tidak memihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diperlukan “Akuntabilitas KPU” yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur, dan adil sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal kedudukan nasional Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tersebut menyatakan “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan kegiatan kehumasan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bupati/KPU”. Juga ditetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan Umum akan merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia.

Partisipasi politik melibatkan individu yang terlibat secara aktif dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif, menggunakan hak pilihnya, bergabung dengan organisasi, mendiskusikan isu politik dengan orang lain, ikut serta dalam aksi dan gerakan, bergabung dengan partai atau organisasi independen, mengambil bagian dalam kampanye, dan menggunakan keterampilannya untuk berkontribusi terhadap lingkungan. (Muhaling, 2014).

Miriam Budiarjo, mengemukakan Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam ranah politik, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung seperti memilih pemimpin atau memengaruhi keputusan kebijakan. Aktivitas ini melibatkan keterlibatan dalam tindakan seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, bergabung dengan partai atau kelompok kepentingan, dan membangun hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ramlan Surbakti menggambarkan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan umum, serta dalam memilih pemimpin pemerintah. (Sastrawati, 2019)

Partisipasi politik dalam negara demokrasi mencerminkan pelaksanaan kekuasaan negara oleh rakyat, karena mereka terlibat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum. Tingkat partisipasi politik merupakan cerminan keterlibatan dan pemahaman rakyat terhadap kegiatan negara. Di sisi lain, kurangnya partisipasi politik biasanya menunjukkan bahwa penduduk kurang antusias atau peduli terhadap masalah atau agenda negara. Kurangnya keterlibatan politik aktif di antara penduduk terbukti dalam sikap Kelompok

Putih (GOLPUT) selama pemilihan umum. (Wardhani, 2018)

Partisipasi politik masyarakat merupakan cerminan nyata dari negara demokrasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum melibatkan partisipasi langsung rakyat atau masyarakat. Dalam skenario ini, partisipasi aktif warga negara sangat penting dalam memilih pejabat negara yang akan mengawasi pemerintah dan tindakan selanjutnya. Selain itu, warga negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyeluruh.

Pada hakikatnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilihan umum dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk mempengaruhi arah pemerintahan terpilih. Masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan mempercayakan mandat mereka kepada orang-orang yang layak dan dapat diandalkan untuk memerintah di masa depan. Lebih jauh, keterlibatan aktif masyarakat dalam politik berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan kehadiran individu dan kelompok sosial dalam masyarakat, yang memberikan pengaruh kepada pemerintah melalui berbagai mekanisme politik. (Putri, 2016)

Pada pemilu serentak tahun 2019 KPU Kota Mataram mencatat jumlah Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten berjumlah 222.687 suara dari jumlah DPT sebanyak 278.358 dimana dari masing-masing kecamatan, kecamatan Ampenan memiliki tingkat partisipasi tertinggi berjumlah 49.134 pemilih dari 57.202 jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, sehingga pada pemilu serentak tahun 2019 total angka partisipasi masyarakat di kota mataram

mencapai 80% dari target Nasional 77%. (antaraNTB, 03/05/2019).

Sayangnya, partisipasi pemilih dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram 2020 tidak sesuai harapan, yakni hanya mencapai 67,2% dari target yang ditetapkan KPU Kota Mataram. Data yang dirilis KPU Kota Mataram menyebutkan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 203.314 dari total 305.824 pemilih terdaftar di 6 Kecamatan. (kpu.go.id diakses tanggal 23 Juli 2022, pukul 03:18 WITA)

Dari hasil Pemilu pada tahun 2019 pemilihan serentak berjumlah 222.687 suara dari jumlah DPT sebanyak 278.358 (80%), sampai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020 berjumlah 203.314 suara dari jumlah DPT sebanyak 305.824 jiwa (67,2%). angka partisipasi masyarakat mengalami penurunan, Oleh karena itu KPU Kota Mataram pada pemilu serentak tahun 2024 akan mengupayakan untuk menaikkan Kembali partisipasi masyarakat kota mataram dari Target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%. (kpu.go.id diakses tanggal 24 Juli 2022, 23:17 WITA)

Sehingga perlu di kaji lebih dalam lagi bagaimana kinerja KPU Kota Mataram dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta melihat kriteria pemilih baik dari kalangan pemuda sampai kalangan lanjut usia. Dengan demikian tidak akan ada lagi rasa apatis dalam masyarakat untuk datang coblos ke setiap TPS yang disediakan oleh KPU Kota Mataram dan mampu mengatasi masalah partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2024 yang ada di Kota Mataram. (kpu.go.id diakses tanggal 25 Juli 2022, pukul 15:39 WITA)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kinerja KPU Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kinerja KPU Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KPU Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja KPU Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KPU Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang di lakukan, dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu adalah manfaat secara teoritis, praktis dan akademik. Adapun uraian dari manfaat penelitian tersebut diatas yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan menawarkan perspektif baru dan memperluas basis pengetahuan yang ada.
2. Memperluas pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan memberikan wawasan kepada pembaca tentang upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram untuk meningkatkan keterlibatan politik publik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

1.4.2 Secara Praktis

1. Manfaat bagi peneliti: dapat mengetahui secara lebih merinci mengenai kinerja komisi pemilihan umum kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024.
2. Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui tentang KPU guna untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.4.3 Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kriteria untuk menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga bagi perguruan tinggi sebagai entitas yang berpengaruh dalam membentuk pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024 sebagai berikut:

1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dapat dilihat dari 5 aspek yaitu kualitas kerja, produktivitas, inisiatif, kerjasama dan tanggung jawab.

Kualitas kerja dari KPU Kota Mataram dapat dilihat dari keberhasilannya Komisioner dan Staff KPU Kota Mataram dalam memfasilitasi proses pemilihan dengan baik di seluruh TPS, serta kemampuan staff KPU Kota Mataram dalam mengelola logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pemilu yang dinilai sudah efektif. KPU Kota Mataram juga telah menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi pemilih dan pemantau pemilu yang dapat diakses melalui jejaring media seperti Website, Instagram, Twitter, dan facebook dari KPU Kota Mataram. Produktivitas dari KPU Kota Mataram dapat dilihat dari proses pendataan pemilih, pengadaan logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman terkait tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilu, yang dianggap berhasil berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pada waktu pemungutan suara KPU Kota Mataram juga telah berhasil mengkoordinasikan pelaksanaan di seluruh TPS dengan baik dan proses

perhitungan suara sampai pada rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kota dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pada waktu terselenggaranya pemilu KPU Kota Mataram juga memiliki inisiatif berupa melakukan edukasi pemilih secara langsung di komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula yang lebih baik dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Melakukan pelatihan intensif kepada petugas KPPS untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, serta memiliki inisiatif dalam mengembangkan platform digital agar memudahkan masyarakat atau pemilih untuk mengakses informasi seputar proses pemungutan suara, daftar calon, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) kepada masyarakat. Disamping itu juga KPU Kota Mataram telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah kota Mataram dalam rangka memastikan dukungan logistik dan infrastruktur seperti, penyediaan TPS, pengamanan dan fasilitas pendukung lainnya, Serta melakukan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan seperti, pemantauan TPS, pendidikan pemilih, dan pengawasan kampanye.

KPU kota Mataram melakukan tanggung jawab yaitu berupa menyampaikan pelaporan mengenai laporan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU NTB sampai KPU RI. Laporan yang dimaksud seperti data kehadiran pemantau dan saksi peserta pemilu di setiap TPS, serta laporan mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara,

seperti data perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan maupun kota, dan data mengenai persentase suara sah yang diperoleh masing-masing calon pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Mataram yaitu tingkat pendidikan, kesadaran politik, peranan pemerintah dan peranan partai politik.

Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dikarenakan ketika semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin luas pengetahuan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu KPU kota mataram telah mengadakan sosialisasi yang sifatnya memberikan edukasi terkait pemilu kepada masyarakat khususnya yang tingkat pendidikannya rendah. Sosialisasi tersebut dilakukan supaya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat mengetahui sedikit-tidaknya mengenai tahapan-tahapan pemilu. Kesadaran politik juga menjadi tonggak utama dalam mempengaruhi kinerja KPU kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu lebih khususnya pilpres di kota mataram tahun 2024, Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kota Mataram dalam memberikan kesadaran politik mengenai pemilu yaitu melakukan sosialisasi secara langsung seperti melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi tidak langsung seperti menyebarkan informasi melalui media online.

Pemerintah Kota Mataram juga memiliki peranan dalam memberikan dukungan moril maupun materil terhadap pelaksanaan pemilu seperti memberikan bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan trantribun dan penugasan personil linmas, serta memiliki peran untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis. Dilain sisi peranan partai politik juga dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan melahirkan pemuda-pemuda yang berkualitas. Selain itu juga pada pelaksanaan pemilu di Kota Mataram, partai politik dituntut untuk terus melakukan pendidikan politik dan melakukan sosialisasi politik terutama pada pemuda dan simpatisannya, serta partai politik memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan calon pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas yang bagus, yang dimana pada akhirnya dapat mendorong pemilih atau masyarakat untuk memilih calon yang diajukan oleh partai politik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti memiliki saran yang sekiranya berguna sebagai bahan pertimbangan dari KPU Kota Mataram dalam melaksanakan pemilu kedepan, adapun sebagai berikut:

1. KPU Kota Mataram dalam pemilu kedepannya harus dapat memastikan dalam pendataan pemilih yang berada di Kota Mataram, agar semua pemilih dapat terdata dan memberikan hak suaranya, serta harus lebih aktif lagi

dalam melakukan sosialisasi.

2. KPU Kota Mataram harus lebih memastikan kesiapan penyelenggara KPPS di setiap TPS dalam memfasilitasi pemilih atau masyarakat yang mencoblos, serta menciptakan ruang akses yang layak bagi seluruh kalangan pemilih lebih khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan pemilih yang lanjut usia.
3. Pada pelaksanaan pemilu kedepan, KPU Kota Mataram harus lebih melibatkan pemuda atau pemilih pemula dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai dan bersih, dikarenakan pemuda memiliki peran penting dalam mengawal pemilu melalui digital atau platform media.

